

LAPORAN KINERJA

KPKNL MALANG



2021

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Jalan S. Supriadi No.157, Kelurahan Bandungrejosari,
Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*. Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan waktu dan kesehatan, dimana sepanjang tahun 2021 kita menghadapi tantangan berat, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun seluruh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang masih diberikan kesempatan memberikan karya terbaik atas capaian kinerjanya sekaligus masih diberikan kepercayaan meraih berbagai penghargaan.

Sepanjang tahun 2021, Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, KPKNL Malang terus beradaptasi dengan tantangan baru yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. KPKNL Malang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Berbagai gagasan, ide, mitigasi risiko, dan upaya menghadapi tantangan, berhasil membawa KPKNL Malang mendapatkan apresiasi dengan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada acara "Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dengan tema "*Making Change, Making History*". Tajuk tersebut mewakili tekad KPKNL Malang dalam melakukan perubahan melalui motto **Melayani, Bersih, Optimis, Inovatif, dan Sinergi (MBOIS)**.

Sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. KPKNL Malang sebagai Instansi Vertikal DJKN telah menyusun Laporan Kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021.

Performance KPKNL Malang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Malang dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2021. Pengukuran kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis *Balanced Score Card*. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Malang Tahun 2021 sebesar 113,64% Hasil tersebut merupakan

capaian seluruh kinerja KPKNL Malang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Malang Tahun 2021.

Di samping itu, melalui Laporan Kinerja yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Malang untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2021 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPKNL Malang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Sebagai simpulan atas semua hal tersebut, kami yakin meski tantangan ke depan semakin beragam dan sulit terprediksi, namun dengan semangat, sinergi, dan disiplin tinggi, KPKNL Malang akan menjadi lebih baik sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Keseluruhan pencapaian tentu saja tidak lepas dari arahan Pimpinan, peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan, dimana kata syukur dan terimakasih tidak dapat mewakili andil tersebut, semoga Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* dapat memberikan balasan yang lebih baik dan keberkahan atas segala jerih payah yang telah tercurah selama ini.

Salam MBOIS,



Asep Suryadi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan sebagian tugas Menteri Keuangan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2021 dijabarkan dalam melalui 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Adapun sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utamanya yang harus dicapai tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dengan Kanwil Jawa Timur. Status capaian IKU Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tahun 2021 adalah **113,64% (hijau)**.

Pada bidang pelaksanaan anggaran, KPKNL Malang mendapatkan apresiasi sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik pada Triwulan I Tahun 2021 untuk pagu di bawah 5 miliar, Satuan Kerja Berkinerja Terbaik II pada Triwulan II Tahun 2021, dan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik II pada Triwulan III Tahun 2021 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang.

Pada Bidang Pelayanan Publik, KPKNL Malang berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2021 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis KPKNL Malang	7
D. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	20
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	24
Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.	25
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	26
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.....	29
Sasaran Strategis 6: Edukasi yang efektif	32
Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	33
Sasaran Strategis 8: SDM yang kompeten	33
Sasaran Strategis 9: Organisasi yang Fit for Purpose	34
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang optimal	36
C. Realisasi Anggaran	38
D. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	39
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN : Nilai Kinerja Organisasi 2021 Kontrak Kinerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang Kode Pos 65148.

KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Susunan organisasi KPKNL Malang sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Pelayanan Lelang;
- d. Seksi Piutang Negara ;
- e. Seksi Pelayanan Penilaian;
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara.

Seksi Pelayanan Penilaian

mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

Seksi Piutang Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di

bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Seksi Pelayanan Lelang

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

Seksi Hukum dan Informasi

mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Seksi Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jabatan Fungsional Pelelang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.

2. Jabatan Fungsional Penilai

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang Milik Negara mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan PH dan atau Penjamin Hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL Malang.

Struktur organisasi **KPKNL Malang** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Bagan I

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



Sumber : PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016

Wilayah kerja KPKNL Malang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kabupaten Lumajang;
4. Kota Batu;
5. Kota Kediri;
6. Kabupaten Kediri;
7. Kota Blitar;
8. Kabupaten Blitar;
9. Kabupaten Jombang;
10. Kabupaten Tulungagung;
11. Kabupaten Trenggalek;

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Malang didukung oleh 40 (empat puluh) orang pegawai, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Jenis Kelamin		Jabatan				Golongan		
			L	P	III	IV	Fungsional	Staf	IV	III	II
1	Kepala Kantor	1	1		1				1		
2	Subbagian Umum	7	6	1		1	2	4		6	1
3	Seksi PKN	7	4	3		1		6	1	6	
4	Seksi Pelayanan Penilaian	5	4	1		1	2	2	1	3	1
5	Seksi Piutang Negara	3	3			1		2		3	
6	Seksi Pelayanan Lelang	7	5	2		1	2	4		7	
7	Seksi Hukum & Informasi	5	3	2		1		4	1	3	1
8	Seksi Kepatuhan Internal	5	1	4		1		4		3	2
	Jumlah	40	27	13	1	7	6	26	4	31	5

*Data per 31 Desember 2021

2. Berdasarkan Pendidikan :

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Kantor	1	1							
2	Subbagian Umum	7			3	1	2	1		
3	Seksi PKN	7		1	4	1		1		
4	Seksi Pelayanan Penilaian	5		1	2		1	1		
5	Seksi Piutang Negara	3			1		1	1		
6	Seksi Pelayanan Lelang	7		1	4		2			
7	Seksi Hukum & Informasi	5		1	2	2				
8	Seksi Kepatuhan Internal	5			2	3				
	Jumlah	40	1	4	18	7	6	4		

*Data per 31 Desember 2021

5. Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pelelang : 2 orang
- b. Penilai Pemerintah : 2 orang
- c. Penatalaksana Barang : 1 orang
- d. Pranata Keuangan APBN: 1 orang

C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Malang memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Malang senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Malang dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel.

Pengukuran Penggunaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan

Salah satu bentuk pengelolaan BMN yang baik adalah penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tools pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi penggunaan BMN adalah menggunakan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Pelaksanaan pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Sertifikasi BMN berupa Tanah

Dalam rangka mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) BMN berupa tanah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi terhadap BMN berupa tanah yang belum bersertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan program ini KPKNL bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja dengan dukungan Satuan Kerja untuk proses penerbitan sertipikat hak pakai.

Utilisasi Aset

Dalam pengelolaan BMN, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa aset yang dikelola telah terutilisasi sesuai peruntukannya. Peran Pengelola sangat vital dalam memberikan penetapan status penggunaan BMN sebagai dasar Kuasa Pengguna Barang menggunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Salah satu perubahan mendasar pada sektor pengelolaan aset Negara adalah pergeseran pola pikir dan sudut pandang. Jika sebelumnya BMN cenderung dipandang dan diperlakukan sebagai suatu beban (*cost center*), kini menjadi suatu investasi yang strategis dalam menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan sekaligus sebagai salah satu faktor sumber penerimaan pendapatan (*revenue center*).

Portofolio BMN yang sangat besar tentu harus dikelola dan diukur kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja aset ini diharapkan dapat merubah paradigma Pengelola BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Evaluasi kinerja aset dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengukur/mengetahui kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN, KPKNL sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset sehingga mengubah paradigma *cost center* menjadi *revenue center*.

Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 dan KPKNL melaksanakan pengurusan piutang negara dengan nilai penyerahan diatas Rp8.000.000,00.

Selanjutnya, KPKNL Malang juga melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Malang secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli (*acte van transport*) untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Malang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih

diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, pada tahun 2021, KPKNL Malang juga melaksanakan kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) Tahun 2021. KEDAI Lelang UMKM ini diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2. Mendorong ide-ide kreatif, inovatif serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli bagi masyarakat.
3. Memasyarakatkan lelang sukarela dengan mengenalkan lebih baik lagi kepada masyarakat penyelenggara lelang, baik KPKNL maupun Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
4. Mengeksplorasi produk UMKM di wilayah kerja kantor penyelenggara lelang dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Malang memperoleh PNBP berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Malang memperoleh bea lelang (bea permohonan lelang, bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual, bea lelang batal, serta bea lelang pegadaian) termasuk Uang Jaminan Lelang dari Pembeli Wanprestasi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Malang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) atau persetujuan pemindahtanganan/penjualan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja **KPKNL Malang** Tahun 2021 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Malang serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Malang tahun 2020.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Malang di tahun yang akan datang.

Sebagai pedoman dan motivasi bagi pegawai, KPKNL Malang membuat *Motto* yaitu **Mbois** yang merupakan kepanjangan dari :

1. Melayani

Melayani artinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang mengedepankan semangat pelayanan kepada pengguna jasa;

2. Bersih

Bersih artinya Menjadi pribadi yang bersih, menjadikan integritas, kejujuran, bertanggung jawab, dan disiplin sebagai landasan dan karakter;

3. Optimis

Optimis artinya Menghadapi tugas dan tantangan dengan semangat;

4. Inovatif

Inovatif artinya Cara berpikir untuk mendapatkan solusi yang baru dan kreatif;

5. Sinergi

Sinergi artinya Membangun kemitraan internal maupun eksternal yang harmonis, bermanfaat, dan sesuai dengan kode etik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden, KPKNL Malang berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, yaitu:

VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN to *distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;

- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

B. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2021 dijabarkan dalam melalui 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU sebagai berikut :

1 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

- IKU : Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120%
- IKU : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 120%
- IKU : Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) tercapai sebesar 120%

2 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

- IKU : Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang tercapai sebesar 111.01%
- IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 120%

3 SS : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien

- IKU : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL tercapai sebesar 102,39%

4 SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

- IKU : Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasikan tercapai sebesar 100%

- IKU : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 120%
- IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120%
- 5 SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tercapai sebesar 120 %
- IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120 %
- IKU : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 105,63 %
- IKU : Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN tercapai sebesar 120 %
- 6 SS : Edukasi yang Efektif**
- IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 101,66 %
- 7 SS : Pengawasan dan pengendalian yang efektif**
- IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai sebesar 114,35 %
- 8 SS : SDM yang Kompeten**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120 %
- 9 SS : Organisasi yang *fit for Purpose***
- IKU : Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM tercapai sebesar 120 %
- IKU : Nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 120 %
- IKU : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai sebesar 120 %
- 10 SS : Pengelolaan Keuangan yang Optimal**
- IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 99,63 %

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPKNL MALANG
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)					30.00%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120.00%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	84.44%	136.194%	120.00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121.37%	121.367%	120.00%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	306.13%	306.13%	120.00%
	Customer Perspective(15%)					16.38%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					116.04%
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	90.00	99.95	111.05%	111.05%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	147.73%	147.73%	120.00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					102.39%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.6	4.71	102.39%	102.39%
	Internal Process Perspective (30%)					33.29%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					111.36%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	100.00%	100.00%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127.27%	127.27%	120.00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.04%	199.82%	120.00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					116.48%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	147.92%	147.92%	120.00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	45.35%	129.58%	120.00%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92.00%	97.18%	105.63%	105.63%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	200.00%	120.00%

6	Edukasi yang efektif					101.66%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	93.53	101.66%	101.66%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					114.35%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	97.20%	114.35%	114.35%
Learning & Growth Perspective (30%)						33.96%
8	SDM yang kompeten					120.00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang fit for purpose					120.00%
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	96.73	128.97%	120.00%
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90.92	121.23%	120.00%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97.30	121.63%	120.00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					99.63%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	95.15%	99.63%	99.63%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						113.64%

Dalam kontrak kinerja tersebut di atas berisi Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU Tahun 2021 dan realisasi capaian IKU Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah turunan dari SS, yang merupakan indikator tercapai/ tidaknya SS tersebut. Pencapaian realisasi IKU dengan status hijau atau $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2021, KPKNL Malang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya

3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan dan sasaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, capaian kinerja, beserta analisisnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Ikhtisar capaian kinerja organisasi terdapat dalam IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL MALANG TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)					30.00%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120.00%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	84.44%	136.194%	120.00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121.37%	121.367%	120.00%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	306.13%	306.13%	120.00%
	Customer Perspective(15%)					16.38%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					116.04%
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	90.00	99.91	111.01%	111.01%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	147.73%	147.73%	120.00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					102.39%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.6	4.71	102.39%	102.39%
	Internal Process Perspective (30%)					33.29%

4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					111.36%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	100.00%	100.00%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127.27%	127.27%	120.00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.04%	199.82%	120.00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					116.48%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	147.92%	147.92%	120.00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	45.35%	129.58%	120.00%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92.00%	97.18%	105.63%	105.63%
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	200.00%	120.00%
6	Edukasi yang efektif					101.66%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	93.53	101.66%	101.66%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					114.35%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	97.20%	114.35%	114.35%
	Learning & Growth Perspective (30%)					33.96%
8	SDM yang kompeten					120.00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang fit for purpose					120.00%
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	96.73	128.97%	120.00%
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90.92	121.23%	120.00%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97.30	121.63%	120.00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					99.63%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	95.15%	99.63%	99.63%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						113.64%

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Terdapat 20 (dua puluh) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Dari 20 (dua puluh) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama telah memenuhi target dengan status HIJAU atau tingkat pencapaian target $\geq 100\%$, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama tidak memenuhi target dengan status Kuning atau tingkat pencapaian target antara 80% hingga 99%

Berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Uraian	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%
Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	100%	84.44%	136.194%	120.00%
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/L	62%	121.37%	121.367%	120.00%
Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	306.13%	306.13%	120.00%

Sasaran Strategis (SS) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%
Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	84,44%	136,19%	120,00%

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditujukan untuk memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas ideal yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Objek tingkat kesesuaian penggunaan BMN tahun 2021 adalah Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara/Mess/Asrama/ Bungalow pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Realisasi persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2021 adalah sebesar 84,44% dari target yang ditetapkan sebesar 62%. Berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh indeks tanpa batas capaian IKU yaitu sebesar 136,19%. Secara keseluruhan capaian atas IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana capaiannya Tahun 2020 adalah sebesar 62%. Secara perbandingan kuantitas, objek yang dilakukan pengukuran SBSK untuk tahun 2020 adalah sejumlah 312 NUP yang berlokasi di Kementerian Keuangan sedangkan untuk tahun 2021 adalah sejumlah 486 NUP yang terdiri dari 174 NUP target baru dan 312 NUP target optimalisasi.

Keberhasilan kenaikan capaian target ini diperoleh berkat upaya maksimal dari tim dalam menerapkan strategi pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian SBSK tahun 2021, yaitu:

- a. sosialisasi urgensi implementasi pengukuran SBSK pada satuan kerja (satker) target segera setelah penetapan target SBSK.
- b. melaksanakan koordinasi intensif dengan Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Pembina KPKNL Malang dan verifikator data capaian SBSK.
- c. penyampaian usulan perubahan target atas aset yang telah berubah peruntukannya sehingga tidak memenuhi kualifikasi SBSK.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya yaitu tahun 2022 antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta persiapan pelaksanaan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					120%
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	121,37%	121,37%	120%
- PNBPN Aset		17.500.000.000	22.034.106.253	125,91%	
- PNBPN Piutang Negara		35.000.000	160.522.654	458,64%	
- PNBPN Lelang		8.294.000.000	9.153.187.449	110,36%	

Nilai Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 adalah 121,37% dengan status capaian HIJAU.

Secara keseluruhan, capaian atas IKU Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian Tahun 2020 sebesar 109,44% dengan rincian PNBPN Aset sebesar Rp17.234.516.594,00, PNBPN Piutang Negara sebesar Rp46.412.376,00 dan PNBPN Lelang sebesar Rp7.570.706.668

Peningkatan capaian IKU yang berasal dari PNBPN Aset sebesar 16,47% apabila dibandingkan antara capaian tahun 2020 dan 2021 sedangkan apabila dibandingkan dengan target existing, PNBPN Aset memiliki capaian 25,91% di atas target yang ditetapkan pada tahun 2021. Hal-hal yang mendukung peningkatan dimaksud, diantaranya implementasi strategi:

- a. Sosialisasi intensif dengan satuan kerja terutama yang memiliki potensi tinggi dalam hal pengelolaan BMN, misalnya satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).
- b. Penggalian potensi PNBPN atas barang rampasan Kejaksaan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi terkait integrasi layanan pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan lelang.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan tindak lanjut persetujuan yang dikeluarkan.
- e. Melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021. Target utama atas pelaksanaan *Crash Program* adalah Piutang Negara yang berasal dari penyerahan Universitas Negeri Malang.

Terdapat kenaikan PNBPN Lelang dari Rp7.570.706.668,00 pada tahun 2020 menjadi Rp9.153.187.449,00 atau naik sebesar 20,9%. Kenaikan capaian ini disebabkan oleh

meningkatnya frekuensi lelang laku pada Triwulan IV 2021 yaitu sebanyak 107 frekuensi lelang dengan capaian Bea Lelang PL I sebesar Rp2.805.331.755,00 dan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp1.015.501.610,00

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2021)**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%
Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	306,13%	306,14%	120,00%

Tingkat penurunan outstanding piutang negara pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dari total nilai outstanding piutang negara sampai dengan tahun 2017. Adapun realisasinya pada tahun 2021 adalah sebesar 306,14% sehingga capaiannya adalah sebesar 120%.

Secara keseluruhan capaian atas IKU penurunan outstanding piutang negara pengelolaan kekayaan negara (Saldo PNDS s.d. 2017) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana capaiannya Tahun 2020 sebesar 120% senilai Rp943.666.999,00. Kenaikan capaian IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara disebabkan pengembalian penyerahan BKPN dari BPJS (Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					116.04%
Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	90.00	99.91%	111.01%	111.01%
Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	147.73%	147.73%	120.00%

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					111,01%
Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	90.00	99.91	111.01%	111.01%

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 mencapai 99,91 dari target yang ditetapkan sebesar 90, sehingga capaiannya adalah sebesar 111,01%.

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 97,27 dari target tahun 2020 sebesar 90.

Hal-hal yang mendukung kenaikan capaian ini tentunya tidak lepas dari penerapan strategi, diantaranya:

- Penerapan checklist dan timeline layanan pengelolaan kekayaan negara
- Sinergitas dan koordinasi yang baik antara pihak yang berkontribusi terhadap layanan utamanya layanan yang bersifat integrasi
- Kontribusi aktif dari Pihak Kepatuhan Internal yang berperan sebagai *Early Warning System* dalam hal peningkatan layanan kepada stakeholder.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Persentase realisasi Pokok Lelang**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					147,73%
Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	147,73%	147,73%	147,73%

Realisasi presentase hasil lelang pada tahun 2021 yakni sebesar 147,73% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 147,73%. Persentase hasil lelang lelang pada tahun 2021 **meningkat** dibandingkan dengan Tahun 2020. Jumlah persentase capaian hasil lelang lelang yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 107,56% dari target sebesar 100%, kenaikan capaian ini disebabkan oleh meningkatnya frekuensi lelang laku pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 322 frekuensi lelang dengan pokok lelang sebesar Rp139.137.294.979,00

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Berkoordinasi untuk penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- b. Berupaya meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien					102,39%
Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,60	4,71	102,39%	102,39%

Sasaran Strategis (SS) untuk birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien					102,39%
Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,60	4,71	102,39%	102,39%

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2021 mencapai 4,71 dari target tahun sebesar 4,60. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 102,39% dengan status capaian **HIJAU**.

Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut realisasinya sebesar 4,70.

Capaian IKU dapat melebihi target, didukung oleh beberapa faktor:

- a. Adanya kampanye terus-menerus terkait anti korupsi dan no gratifikasi.
- b. Penyediaan layanan pengaduan yang dapat diakses 24 jam.
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kantor sehingga dapat meningkatkan kenyamanan stakeholder.
- d. Upaya peningkatan pemahaman Person In Charge atas layanan yang akan diberikan kepada stakeholder melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2022 adalah melakukan perbaikan pada aspek penting yang menjadi prioritas perbaikan layanan yaitu kesesuaian prosedur dan waktu penyelesaian layanan.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					111.36%
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127.27%	127.27%	120.00%
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.04%	199.82%	120.00%

Sasaran Strategis (SS) untuk Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					100%
Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	P/L	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Jumlah persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada tahun 2021 sebesar 115 bidang sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 115 bidang. Berdasarkan realisasi dimaksud, diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan status capaian **HIJAU**.

Persentase capaian persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tersebut setara dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Target yang sama nilainya dengan capaian mengindikasikan bahwa kegiatan verifikasi bidang tanah target berupa pengusulan daftar indikatif dan nominatif pensertipikatan yang merupakan salah satu langkah pra sertifikasi sangat rigid dan seksama.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan oleh Kementerian/Lembaga
4. melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada Kementerian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan setempat untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN dimana output yang dihasilkan adalah sertifikat.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					120,00%
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127.27%	127.27%	120.00%

Capaian presentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2021 yakni sebesar 127,27% (182 NUP) dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% (143 NUP) dengan status capaian **HIJAU**.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum (Objek Kepentingan Umum, Rahasia Negara, Alutsista), manfaat sosial (Indikator yang sudah diterima secara Internasional), kepuasan pengguna (Reliability, Responsiveness, Assurance, Performance, Features, Aesthetics, Durability, Serviceability, Quality), potensi penggunaan masa mendatang (Penggunaan masa depan dengan kategori & signifikansi aset), kelayakan finansial (Manfaat ekonomi/ Pembedaan antara komersial & non komersial aset) dan kondisi teknis (Baik, rusak ringan & rusak berat sesuai PMK 181). Evaluasi kinerja BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja BMN, maka diperlukan data/informasi dari Pengguna Barang terkait aset yang akan dievaluasi dan survei data sewa aset sejenis di sekitar lokasi aset.

Kegiatan evaluasi kinerja BMN yang diformulasikan dalam IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.06/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2019 tentang Tahap Implementasi dan Mekanisme Perhitungan Nilai Indikator dan Prosedur Teknis Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Barang Milik Negara.

Capaian persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tersebut meningkat secara kuantitas NUP yang dilaksanakan profiling dibandingkan tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penyelesaian profil NUP Aset, yakni:

1. Pembentukan beberapa tim dengan teamwork yang solid dan pembagian beban kerja tim yang jelas sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja aset dapat dilaksanakan secara simultan.
2. Pendalaman materi terkait Evaluasi Kinerja Aset dengan menugaskan tim untuk mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Evaluasi Kinerja Portofolio Aset
3. Melakukan clusterisasi target dan penyusunan timeline sehingga terdapat panduan yang jelas dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Deviasi ketergunaan hasil penilaian**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					120,00%
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,04%	199,82%	120,00%

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 0,04% dari target yang ditetapkan maksimal sebesar 22%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120% dengan status capaian HIJAU.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian tersebut dihitung dari 118 Laporan Penilaian dengan Obyek Penilaian khususnya berupa Barang Milik Negara. 2020 sebesar 0% dari target tahun 2020 sejumlah 30%. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan Survei Lapangan Penilaian untuk semua objek yang berupa tanah dan bangunan.
2. Untuk objek selain tanah dan/atau bangunan, Seksi Pelayanan Penilaian berkoordinasi dengan Seksi PKN sehingga objek yang dimohonkan penilaian oleh Seksi PKN adalah barang yang nilai usulannya masih rendah atau belum mencerminkan nilai wajar.
3. Edukasi oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara kepada satuan kerja selain terkait pengelolaan kekayaan negara termasuk pula edukasi terkait penentuan nilai indikasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dengan melibatkan fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Malang;
4. Memfilter dan mengklasifikasi data pembanding untuk membentuk nilai wajar yang akuntabel.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					116.48%
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	P/M	100%	147.92%	147.92%	120.00%
Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	45.35%	129.58%	120.00%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92.00%	97.46%	105.94%	105.94%
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	200.00%	120.00%

Sasaran Strategis (SS) untuk Penerapan Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 : Persentase efektivitas penyelesaian BKNP

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					120,00%
Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	P/M	100%	147,92%	147,92%	120,00%

Realisasi presentase efektivitas penyelesaian BKNP pada tahun 2021 sebesar 147,92% (463 BKNP) dari target sebesar 100% (313 BKNP). Sehingga capaian presentase efektivitas penyelesaian BKNP pada tahun 2021 adalah sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Capaian presentase efektivitas penyelesaian BKNP tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 131,44% dari target tahun 2020 sejumlah 100% (168 BKNP). Kenaikan capaian ini disebabkan pengembalian penyerahan BKNP dari BPJS (Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan adanya pelaksanaan Crash Program (Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian

Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021).

KPKNL Malang menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Juara 2 dalam pelaksanaan *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2021 dengan Katagori BKPN Terbanyak Lunas dengan *Crash Program* 2021 (Semester I)

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 11: Persentase produktivitas lelang**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					120,00%
Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	45.35%	129.58%	120.00%

Realisasi presentase produktivitas lelang pada tahun 2021 adalah sebesar 45,35% dari target yang ditetapkan sebesar 35%, sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hasil tersebut diperoleh dari rincian frekuensi lelang laku sebanyak 322 frekuensi dari total 710 frekuensi di tahun 2021. Terdapat **kenaikan capaian** jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 41,03% dari target 2020 sebesar 34%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan FGD internal untuk mencari solusi setiap ada permasalahan lelang yang muncul antara kepala Kantor, Kasi HI, Kasi KI, Kasi PL dan Pelelang.
2. Melakukan penggalian potensi lelang kepada *stakeholders* agar mendahulukan permohonan lelang yang mempunyai potensi lelang laku.
3. Mengurangi adanya permohonan kelengkapan dokumen dengan penyelesaian secara in formal.
4. Merubah cara kerja dalam rangka memberikan pelayanan lelang yang optimal, misalnya merubah role verifikasi berkas menjadi satu dengan pelelang.

KPKNL Malang berpartisipasi nyata mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid 19 dengan mengikuti Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM tahun 2021. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM di wilayah kerja KPKNL Malang. Hasil dari pelaksanaan Kedai Lelang UMKM Tahun 2021 turut berkontribusi meningkatkan produktitas lelang. KPKNL Malang meraih Juara 3 (ketiga) pada Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM tahun 2021.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					105,94%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	97,46%	105,94%	105,94%

Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tahun 2021 adalah sebesar 97,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaiannya adalah 105,94% dengan status capaian **HIJAU**.

Capaian pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,10% dari target tahun 2020 sejumlah 90%. Kenaikan capaian ini disebabkan oleh pelaksanaan lelang selama tahun 2021 seluruhnya sudah melalui aplikasi lelang.go.id kecuali lelang kayu PT. Perhutani sebanyak 20 frekuensi.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					120,00%
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0%	200,00%	120,00%

Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2021 adalah sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 12,50%, sehingga capaiannya adalah 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Deviasi penerimaan negara merupakan selisih yang terdiri dari :

1. pencatatan biaya administrasi piutang negara di aplikasi Focus PN dan pencatatan penyetoran biaya administrasi di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN); dan
2. pencatatan bea lelang PL I yang meliputi bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan bea lelang batal dan bea permohonan lelang, dan jasa lainnya (uang jaminan pembeli wanprestasi dan biaya penggantian kutipan Risalah Lelang) pada Dropbox lelang dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN);

3. pencatatan bea lelang Pegadaian pada Modul Pegadaian dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN).

Kategori selisih adalah terdapat perbedaan jumlah biaya administrasi, sehingga adanya perbedaan waktu ke kas negara dengan pencatatan di aplikasi Focus PN selama dapat dijelaskan, tidak dikategorikan sebagai selisih.

Strategi yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN agar tidak ada selisih pencatatan biaya administrasi Piutang Negara dan Bea Lelang sebagai berikut:

- 1) Pencatatan real time di aplikasi FocusPN;
- 2) Rekonsiliasi mingguan antara Seksi Hukum dan Informasi dengan seksi Piutang Negara guna memastikan validitas pencatatan;
- 3) Rekonsiliasi Internal yang dilakukan bendahara penerimaan antara data rekening penampungan dengan data OmSPAN;
- 4) Update data transaksi yang terjadi pada aplikasi OM-SPAN diinput ke Dropbox;
- 5) Monitoring pelaksanaan lelang ke dalam aplikasi Dropbox;

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Edukasi yang Efektif

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Edukasi yang efektif					101,66%
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	93,53	101,66%	101,66%

Sasaran Strategis (SS) untuk Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Tingkat efektivitas edukasi & komunikasi

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Edukasi yang efektif					101,66%
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	93,53	101,66%	101,66%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 sebesar 93,53 dari target sebesar 92. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 101,66% dengan status capaian **HIJAU**.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 **menurun** dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 96,22 dari target tahun 2020 sebesar 92 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,58%. Adapun nilai edukasi dan komunikasi pada semester I Tahun 2021 rata-rata 92,66 yang diperoleh dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar 93,00, Seksi Piutang Negara sebesar 92,14, dan Seksi Pelayanan Lelang sebesar 92,85. Sedangkan pada Semester II Tahun 2021 rata-rata 94,40 yang diperoleh dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar 96,00, Seksi Piutang Negara sebesar 95,00, dan Seksi Pelayanan Lelang sebesar 92,20.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif					114,35%
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	85%	97,20%	114,35%	114,35%

Sasaran Strategis (SS) Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif berhasil memperoleh status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 15: Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif					114,35%
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	85%	97,20%	114,35%	114,35%

Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN yang dicapai pada tahun 2021 sebanyak 97,20% dengan target tahun 2021 sebesar 85%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 114,35% dengan status capaian **HIJAU**. Capaian tahun 2021 **meningkat** dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 96,97% dari target tahun 2020 sebesar 80%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan yang telah diterbitkan dengan intensif.
2. Memverifikasi atas usulan yang diajukan sebelum penerbitan persetujuan dengan melalui checklist yang rigid sehingga mengantisipasi adanya penyewa yang tidak memenuhi syarat.
3. Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai pembina KPKNL Malang untuk memperoleh data dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan PNBPN yang telah disetor oleh penyewa atau pembeli lelang BMN.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: SDM yang Kompeten

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
SDM yang kompeten					120,00%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%

Sasaran Strategis (SS) untuk SDM yang kompetitif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
SDM yang kompeten					120,00%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%

Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**. Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 tetap dibandingkan Tahun 2020 dengan capaian sebesar 120% dari Target 100%. hal ini disebabkan karena kesadaran masing-masing pegawai untuk terus mengembangkan kemampuannya sangatlah tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan secara rutin menginformasikan pengumuman

diklat dan mendorong seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Malang untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi.

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Organisasi yang *Fit for Purpose*

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Organisasi yang <i>fit for purpose</i>					120,00%
Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	P/M	75	96,73	128,97%	120,00%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90.92	121,23%	120,00%
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97.30	121,63%	120,00%

Sasaran Strategis (SS) untuk organisasi yang *fit for purpose* mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 : Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Organisasi yang <i>fit for purpose</i>					120,00%
Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	P/M	75	96,73	128,97%	120,00%

Realisasi Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM pada tahun 2021 sebesar 96,73 dari target sebesar 75. Sehingga capaian Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM pada tahun 2021 adalah sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Realisasi Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM pada tahun 2021 sebesar 96,73 dihitung berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian (TPK) Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian	Syarat Minimal	Capaian KPKNL Malang
A.	PROSES/PENGUNGKIT (60)		
I.	Manajemen Perubahan (8)	4,8	8
II.	Penataan Tata Laksana (7)	4,2	7

III.	Penataan Manajemen SDM (10)	6	8,9
IV.	Penguatan Akuntabilitas (10)	6	10
V.	Penguatan Pengawasan (15)	9	13,95
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)	6	9,8
	TOTAL NILAI PROSES/PENGUNGKIT		57,65

Strategi yang telah dilaksanakan hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Kerja dengan melibatkan seluruh pegawai termasuk PPNPN.
2. Pemenuhan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas.
4. Melakukan perubahan budaya dan pola pikir sesuai dengan tujuan dan sasaran Zona Integritas, dengan pembentukan Agen Perubahan yang bertugas antara lain memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Malang tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada Zona Integritas.
6. Peningkatan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui inovasi-inovasi dan digitalisasi layanan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam proses pembangunan ZI. KPKNL Malang membuat beberapa inovasi baik untuk peningkatan proses bisnis internal maupun peningkatan pelayanan secara langsung kepada stakeholders, antara lain:
 - a. Percepatan Norma Waktu Layanan Unggulan
 - b. SMART-APT
 - c. SIPINTAR (Sistem Pembayaran Piutang Negara)
 - d. SI-IMAS (Sisten Informasi Manajemen Aset)
 - e. Layanan Informasi dan Pengaduan
 - f. Kartu Parkir dan Kartu Pengunjung

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 18: Nilai hasil review pengelolaan kinerja

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Organisasi yang fit for purpose					120,00%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90.92	121,23%	120,00%

Nilai hasil review pengelolaan kinerja yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 90.92 dari target pada tahun 2021 sebesar 75. sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 121,23% dengan status capaian **HIJAU**.

Capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja pada tahun 2021 **meningkat** dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 79,62 dari target tahun 2020 sebesar 70, dengan persentase capaian kinerja sebesar 113,74%, hal ini tercapai dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilakukan dengan baik, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan atau eksekusi kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan intensitas edukasi kinerja yang dilaksanakan rutin untuk mengetahui permasalahan dan solusinya.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 19: indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator**

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Organisasi yang fit for purpose					120,00%
Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97.30	121,63%	120,00%

Realisasi indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator pada Tahun 2021 adalah sebesar 97,30 (nilai rata-rata dari Triwulan I sebesar 96,80, Triwulan II sebesar 96,90, Triwulan III sebesar 97,20, dan Triwulan IV sebesar 98,30) dari target yang telah ditetapkan sebesar 80 sehingga persentase capaian kinerja adalah 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada Tahun 2021

FGD	Pelaksanaan	Nilai
Triwulan I	Telah dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Februari 2021	96,80
Triwulan II	Telah dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juni 2021	96,90
Triwulan III	Telah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 September 2021	97,20
Triwulan IV	Telah dilaksanakan FGD Triwulan IV tanggal 30 November 2021	98,30
Rata-rata		97,30

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada setiap triwulan oleh Pejabat Administrator dengan materi sesuai yang disampaikan oleh CTO – Sekretariat Jenderal dan disampaikan kembali dengan tepat waktu yang dinilai berdasarkan hasil survei yang diberikan kepada seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Malang.

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Administrator untuk pencapaian IKU indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yang dikoordinir oleh Setjen (CTO) dengan memperhatikan beberapa parameter sebagai berikut:

1. Kecepatan, bahwa materi FGD telah disampaikan kepada pegawai, 1 hari setelah pelaksanaan Pra-FGD.
2. Feedback peserta yang terdiri dari content (topik materi dan pesan yang disampaikan), delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator, dan contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Keuangan yang Optimal					99,63%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,15%	99,63%	99,63%

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Keuangan yang Optimal mendapat status capaian **KUNING**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 20: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Pengelolaan Keuangan yang Optimal					99,63%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,15%	99,63%	99,63%

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 95,15% dari target pada tahun 2021 sebesar 95,5% sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 99,63% dengan status capaian **KUNING**.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 pada Triwulan IV menggunakan perhitungan secara komposit dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 60%. Untuk Perhitungan IKU PKPA mengandalkan

aplikasi OmSPAN - MonevPA untuk melihat 13 indikator hasil IKPA dan aplikasi SMART Kemenkeu untuk melihat Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	NILAI IKPA		99,40
1	Pengelolaan Uang Persediaan	8	8,00%
2	Data Kontrak	10	10,00%
3	Kesalahan Surat Perintah Membayar	5	4,75%
4	Retur SP2D	5	5,00%
5	Halaman III DIPA	5	4,68%
6	Revisi DIPA	5	5,00%
7	Penyelesaian Tagihan	10	10,00%
8	Konfirmasi Capaian Output	17	17,00%
9	Rekon LPJ	5	5,00%
10	Perencanaan Kas	0	0,00%
11	Realisasi	15	15,00%
12	Pagu Minus	5	5,00%
13	Dispensasi SPM	5	5,00%

Capaian nilai SMART DJA KPKNL Malang adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43,50%	100,00%	43,50%
Nilai Efisiensi	28,60%	2,18%	21,02%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%	99,92%	18,19%
Penyerapan Anggaran	9,70%	99,04%	9,61%
CAPAIAN SMART DJA			92,31%

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Capaian Tertimbang
IKPA	40,00%	39,76%
SMART DJA	60,00%	55,39%
CAPAIAN SMART DJA		95,15%

Nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran selama 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target Tahunan	Realisasi	%
Pelaksanaan anggaran yang optimal				
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	2019	95%	99,48%	104,66%
	2020	95%	99,45%	104,68%
	2021	95,5%	95,15%	99,63%

Adapun capaian tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) (dahulu bernama SMART-DJA) yang sudah mengimplementasikan secara penuh perhitungan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) pada Tahun Anggaran 2021 dengan empat Indikator yaitu Capaian Output, Konsistensi, Penyerapan Anggaran dan Efisiensi, dimana perolehan KPKNL Malang mencapai nilai 87,15.
- b. Pada Tahun 2021 DJKN mengalami 4 kali refocusing. Refocusing dilakukan untuk melakukan alokasi anggaran kepada prioritas saat itu (dalam hal ini pandemi COVID-19), sehingga Pagu Anggaran setelah refocusing keempat benar-benar dibutuhkan oleh satker dan kemungkinan sangat kecil terdapat sisa anggaran yang bisa masuk dalam kategori Efisiensi.
- c. Terdapat Perubahan Manual IKU pada Jenis Konsolidasi Periode, dimana Pada tahun 2020, IKU PKPA memiliki konsolidasi periode Average, capaian tahunan merupakan rata-rata dari nilai triwulan I-IV. Dalam kondisi ini, nilai optimal pada triwulan I-III dan mengkompensasi nilai yang kurang pada Triwulan IV. Sedangkan pada tahun 2021, jenis konsolidasi periode pada IKU PKPA adalah *Take Last Known*, sehingga capaian yang diambil adalah capaian terakhir (Triwulan IV). Dengan kondisi ini, nilai yang tinggi pada triwulan I-III tidak dapat mengkompensasi nilai pada triwulan IV.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kinerja PNBP pada KPKNL Malang TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.	PNBP Aset	22.034.106.253	17.234.516.594
2.	PNBP Piutang Negara	160.522.654	46.412.376
3.	PNBP Lelang	9.153.187.449	7.570.706.668

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN c.q. KPKNL Malang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan KPKNL Malang tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian **HIJAU**:

1. Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
3. Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)
4. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasikan
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
11. Persentase produktivitas lelang
12. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
13. Deviasi Data PNDP Fungsional DJKN
14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
15. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

17. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM
18. Nilai hasil review pengelolaan kinerja
19. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
20. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

A. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pencapaian tahun 2021 sudah di atas target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Malang, dengan nilai kinerja organisasi sebesar 113,64% dengan capaian HIJAU terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) yang mendapat capaian KUNING yaitu terdapat perubahan formulasi pada manual IKU PKPA, dimana sebelumnya pada Tahun 2020 jenis konsolidasi periode adalah *Average* (capaian tahunan merupakan rata-rata dari nilai Triwulan I s.d IV). Sedangkan pada tahun 2021, jenis konsolidasi periode adalah *Take Last Known*, sehingga capaian yang diambil adalah capaian terakhir (Triwulan IV). Dengan kondisi ini, nilai yang tinggi pada akhir Triwulan I s.d. III tidak dapat mengkompensasi nilai pada Triwulan IV.

B. Strategi Pemecahan Untuk Tahun 2021

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di tahun 2021 tersebut, maka di tahun 2022 diperlukan strategi yang tepat masalah-masalah tersebut.

Dari permasalahan dan kendala pada KPKNL Malang tersebut, rencananya akan dilakukan upaya yaitu akan melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengantisipasi pencapaian IKU PKPA, dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran secara berkala dan komprehensif.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dimaksudkan sebagai arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2021 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dengan visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.



LAMPIRAN





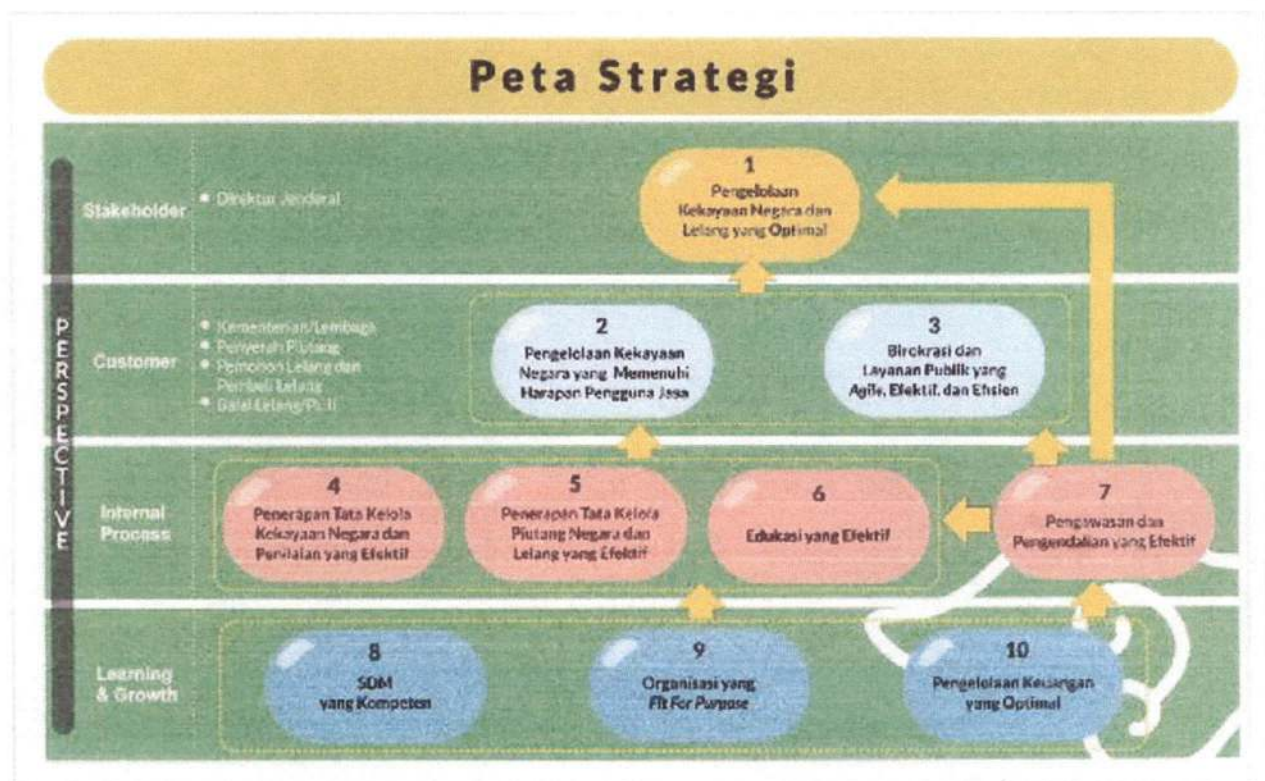
KONTRAK KINERJA
NOMOR 9/KN.22/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



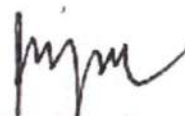
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNI.	4,6
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SIDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau hangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	

Malang, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Asep Suryadi
NIP 196909101991031004

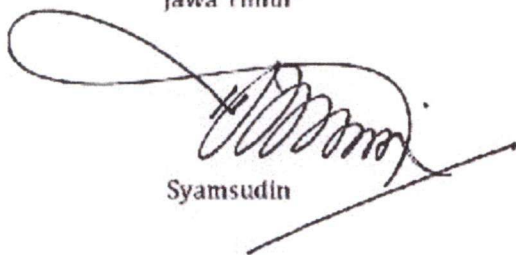
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	90	90	90	90	90	90	90
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,6	4,6
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	312.106.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	9.066.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	47.582.000
3. Pengelolaan Aset	255.458.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	0
Dukungan Manajemen	2.572.517.000
1. Legislasi dan Litigasi	70.000.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.490.326.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	6.111.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	0
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.080.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	0

Malang, 29 Januari 2021

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN
Jawa Timur



Syamsudin

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Malang




Asep Suryadi

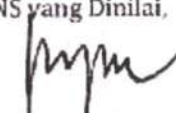
Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Syamsudin	1	Nama	Asep Suryadi
2	NIP	196305201983111001	2	NIP	196909101991031004
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I/IV.b	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I/IV.b
4	Jabatan	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	90	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,6	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E- Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	75	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp.2,9 M

Malang, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

 Syamsudin
 NIP 196305201983111001

PNS yang Dinilai,

 Asep Suryadi
 NIP 196909101991031004

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Organisasi yang Fit For Purpose							
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Malang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Malang



Asep Suryadi

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
JANUARI S.D. DESEMBER
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30.00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120.00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	84.44%	19%	40%	136.194%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121.37%	14%	30%	121.367%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	306.13%	14%	30%	306.13%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.38%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116.04%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	90.00	99.91	11%	44%	111.01%	111.01%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	147.73%	14%	56%	147.73%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							102.39%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.6	4.71	21%	100%	102.39%	102.39%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33.29%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							111.36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	19%	43%	100.00%	100.00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127.27%	11%	25%	127.27%	120.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.04%	14%	32%	199.82%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							116.48%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	147.92%	14%	25%	147.92%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	45.35%	14%	25%	129.58%	120.00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92.00%	97.46%	14%	25%	105.94%	105.94%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							101.66%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92	93.53	14%	100%	101.66%	101.66%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							114.35%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	97.20%	14%	50%	114.35%	114.35%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33.96%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120.00%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	96.73	14%	33%	128.97%	120.00%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90.92	14%	33%	121.23%	120.00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97.30	14%	33%	121.63%	120.00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							99.63%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	95.15%	14%	100%	99.63%	99.63%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113.64%	hijau

		Target/Realisasi	92	92.66	93	93	94.40	93.53
		Capaian IKU	-	92.66	92.66	92.66	94.40	93.53
7	-	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
7a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK					
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		75	75	99	99	58
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L			0		0	46
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020		103	103	107	107	60
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021			0		0	47
		Capaian IKU	-	72.82%	72.82%	92.52%	92.52%	97.20%
7b-CP	P/M	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti						
		Jumlah realisasi tindak lanjut rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas pada aplikasi team central						
		Saldo rekomendasi Itjen yang harus ditindaklanjuti						
		Capaian IKU					#DIV/0!	#DIV/0!
8	-	SDM yang kompeten						
8a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK					
		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		9	26	26	38	39
		Jumlah bawahan total		39	40	40	39	39
		% Capaian Utama		23.08%	65.00%	65.00%	97.44%	97.44%
		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		0	26	26	38	39
		Jumlah bawahan total		39	40	40	39	39
		% Capaian Tambahan		0.00%	65.00%	65.00%	97.44%	97.44%
		Capaian IKU		23.08%	78.00%	78.00%	116.92%	116.92%
9	-	Organisasi yang fit for purpose						
9a-N	P/M	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	MAX/TLK					
		Target/Realisasi	75				96.73	97
		Capaian IKU	-				128.97%	128.97%
9b-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	MAX/TLK					
		Target/Realisasi	75				90.92	91
		Capaian IKU	-				121.23%	121.23%

	9c-N	P/M	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	80	96.80	96.90	96.85	97.20	96.97	98.30	97.30
			Capaian IKU	-	96.80	96.90	96.85	97.20	96.97	98.30	97.30
10	-		Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	95.50%	100.00%	98.39%	98.39%	99.29%	99.29%	95.15%	95.15%
		Capaian IKU		100.00%	98.39%	98.39%	99.29%	99.29%	95.15%	95.15%	